

12. Estimasi kerugian Komitmen dan Kontinjensi	1,769	-
13. Kewajiban sewa guna usaha	-	-
14. Beban yang masih harus dibayar	-	-
15. Taksiaran Pajak Penghasilan	3,387	1,078
16. Kewajiban Pajak tangguhan	4,949	2,976
17. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	22,977	27,024
18. Pinjaman Subordinasi	-	-
19. Pinjaman Subordinasi	-	-
20. Modal Pinjaman	-	-
21. Hak Minoritas	-	-
22. Ekuitas	225,499	199,342
23. Ekuitas	150,719	126,522
24. Modal Disetor	177	177
25. Agio (Disagio)	1,698	5,000
26. Dana Storan Modal	-	-
27. Selisih Penjabaran Laporan Keuangan	-	-
28. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	-	-
29. Laba(rugi) yang belum direalisasi dari surat berharga	-	-
30. Pendapatan Komprehensif lainnya	72,905	67,643
31. Saldo Laba (Rugi)	3,336,846	2,877,203

I	PHAK TERKAIT	L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
A.	AKTIVA PRODUKTIF												
1.	Pemepitan pada Bank lain	1,825	-	-	-	-	1,825	1,825	-	-	-	-	1,825
2.	Surat-surat Berharga Kopasid Pihak Ketiga dan Bank Indonesia	12,904	-	-	-	-	12,904	6,137	-	-	-	-	6,137
3.	Kredit kepada Pihak Ketiga	2,410	-	-	-	-	2,410	256	-	-	-	-	256
b.	Kredit Proroti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Tidak direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Kredit yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Lainnya	10,494	-	-	-	-	10,494	5,881	-	-	-	-	5,881
4.	Penyerahan pada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Pada perusahaan keuangan non-Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Dalam rangka restrukturisasi kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Tagihan lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	AKTIVA NON PRODUKTIF												
1.	Properti berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Arunan Yang Diambil Alih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rekening Antar Kantor dan Suspense account	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	PHAK TIDAK TERKAIT												
A.	AKTIVA PRODUKTIF	247,603	22,757	2,305	3,235	6,967	247,603	882,721	22,757	2,305	3,235	6,967	882,721
1.	Pemepitan pada Bank lain	2190,913	8,878	992	1,186	3,929	2,225,095	1,561,360	8,878	992	1,186	3,929	2,225,095
2.	Surat-surat Berharga Kopasid Pihak Ketiga dan Bank Indonesia	60,407	189	11	18	69	75,392	103,923	189	11	18	69	103,923
3.	Kredit kepada Pihak Ketiga	2,542	-	-	-	-	2,542	3,088	-	-	-	-	3,088
b.	Kredit Proroti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	Tidak direstrukturisasi	2,542	189	11	18	69	2,829	3,088	206	20	58	612	3,984
c.	Kredit yang direstrukturisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d.	Lainnya	2,127,964	13,690	1,302	949	2,969	2,146,874	1,454,349	13,690	1,302	949	2,969	2,146,874
4.	Penyerahan pada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a.	Pada perusahaan keuangan non-Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b.	Dalam rangka restrukturisasi kredit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.	Tagihan lain kepada pihak ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Komitmen dan Kontinjensi kepada pihak ketiga	173,208	-	-	-	-	173,208	174,386	-	-	-	-	174,386
B.	AKTIVA NON PRODUKTIF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Properti berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Arunan Yang Diambil Alih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rekening Antar Kantor dan Suspense account	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	PHAK TIDAK TERKAIT	2,923,939	22,757	2,305	3,235	6,967	2,959,203	2,844,115	22,757	2,305	3,235	6,967	2,903,358
4.	JUMLAH	26,311	1,138	345	1,076	6,592	35,462	16,881	1,138	345	1,076	6,592	39,349
a.	PPA produktif yang wajib dibentuk	26,311	1,138	345	1,076	6,592	36,003	16,881	1,138	345	1,076	6,592	39,753
b.	PPA non produktif yang wajib dibentuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404
c.	Total PPA yang wajib dibentuk	26,311	1,138	345	1,076	6,592	36,003	16,881	1,138	345	1,076	6,592	39,349
d.	PPA produktif yang telah dibentuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404
e.	PPA non produktif yang telah dibentuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404
f.	Total PPA yang telah dibentuk	26,311	1,138	345	1,076	6,592	36,003	16,881	1,138	345	1,076	6,592	39,753
g.	Total aset bank yang dijaminan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h.	Pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i.	Pada pihak lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Presentase KUK terhadap total kredit	-	-	-	-	-	5,57	5,57	-	-	-	-	7,66
8.	Presentase Jumlah debitur KUK terhadap total debitur	-	-	-	-	-	6,43	6,43	-	-	-	-	3,43
9.	Presentase UMKM terhadap total kredit	-	-	-	-	-	6,96	6,96	-	-	-	-	14,85
10.	Presentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur	-	-	-	-	-	6,51	6,51	-	-	-	-	18,58

Manado, 31 Maret 2010
PT. BANK SULUT
Direksi,

[Signature]
JEFFERY J. WURANGIAN
Direktur Utama

[Signature]
BOBBY F. MAKASUTJI
Direktur

Torang pe Bank

Kini Tampil Lebih Baik
BANK SULUT

PENGURUS DAN PEMILIK BANK
POSISI PER 31 DESEMBER 2009

NO.	DEWAN KOMISARIS			PENGURUS BANK			PEMILIK BANK		
	NAMA	JABATAN	NO.	NAMA	JABATAN	NO.	NAMA	NO.	%
1.	Dis. Robby Jimmy Mamula	Komisaris Utama	1	Jeffrey J. Wurangian	Direktur Utama	1	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	1	49,35
2.	Muhammad Arsyad Daud	Komisaris	2	Richwan A. Ngilulu	Direktur	2	Koperasi Karyawan Bank Sulut	2	10,43
3.	John Rumondor	Komisaris	3	Bobby F. Makasutji	Direktur	3	Pemerintah Kab. Bolelemo	3	7,30
4.	Jantje Monalu	Komisaris	4	-	-	4	Pemerintah Kab. Gorontalo	4	5,44
							Pemerintah Kab. Gorontalo	5	5,22
							Pemerintah Kab. Minahasa	6	4,56
							Pemerintah Kota Bitung	7	4,37
							Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	8	3,37
							Pemerintah Kota Manado	9	2,84
							Pemerintah Kab. Sangihe	10	2,76
							Pemerintah Kota Gorontalo	11	2,65
							Pemerintah Kab. Pohuwato	12	0,84
							Pemerintah Kota Tomohon	13	0,67
							Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	14	0,17
							Pemerintah Kab. Minahasa Utara	15	0,01
							Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	16	0,01

Catatan :

- Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudarnadi & Dadang, Registered Public Accountants Lisence No. : KEP - 007/KM.5/2006, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualan.
- Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah disahkan kembali.
- Laporan Keuangan ini dipublikasikan sesuai dengan Ketentuan SE/BI No.3/30/DPNP tanggal, 14 Desember 2001 melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor.3/22/PI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank yang disempurnakan dengan Ketentuan SE BI No.7/10/DPNP tanggal, 31 Maret 2005.

